

Hilirisasi Aspal Buton Menguat, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Ambil Peran Strategis Nasional



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mulai mengambil langkah strategis dalam mendorong hilirisasi Aspal Buton (Asbuton) dengan membuka peluang investasi industri pengolahan di daerah penghasil. Langkah itu ditandai melalui pertemuan Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, bersama perwakilan PT Jaya Trade Indonesia di Jakarta, Senin (11/5/2026), guna membahas rencana pengembangan industri pengolahan Asbuton di Pulau Buton.

Pertemuan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa daerah penghasil kini mulai aktif mengambil peran dalam agenda hilirisasi nasional, di tengah perdebatan publik terkait arah pembangunan industri Aspal Buton yang

Lanjut ke Hal: 7

Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Revitalisasi Gedung Heritage dan Layanan Kominfo



Laporan: Firman

BAUBAU, BP -Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc menegaskan komitmen Pemerintah Kota Baubau dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pembenahan fasilitas kerja dan peningkatan komunikasi internal aparat saat melakukan kunjungan kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Baubau, Selasa (12/05/2026).

Kunjungan tersebut tidak hanya difokuskan

pada evaluasi pelayanan publik, tetapi juga menyoroti rencana revitalisasi gedung heritage yang saat ini digunakan Dinas Kominfo. Pemerintah daerah menilai pembenahan perlu dilakukan tanpa menghilangkan nilai sejarah dan karakter arsitektur bangunan lama tersebut.

Dalam dialog bersama pegawai, Wa Ode Hamsinah Bolu mengatakan pihaknya sengaja membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh unsur pegawai, mulai dari Aparatur Sip-

il Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga paruh waktu.

“Selama ini koordinasi lebih sering terbatas pada pimpinan seperti kepala dinas atau kepala bidang. Saya ingin mendengar langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi staf agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Wa Ode Hamsinah Bolu.

Lanjut ke Hal: 7

Razia Kamar Binaan Lapas Baubau, Petugas Temukan Botol Kaca hingga Cutter



Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Baubau melaksanakan razia di sejumlah kamar hunian warga binaan. Kegiatan tersebut menemukan sejumlah barang terlarang saat melakukan razia di dalam Lapas. Barang-barang tersebut di antaranya botol kaca, ikat pinggang, alat makan berbahan stainless, hingga cutter.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, Abdul Waris, mengungkapkan bahwa da-

lam razia pihak petugas tidak menemukan telepon genggam maupun narkoba.

“Yang ditemukan hanya botol-botol kaca, ikat pinggang, alat makan dari besi stainless, dan cutter. Untuk HP dan narkoba hasilnya tidak ada,” ujar Abdul Waris, saat diwawancara sejumlah awak media, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, masuknya barang-barang tersebut ke dalam lapas terjadi karena adanya kelalaian petugas saat pemeriksaan. Menurutnya, beberapa barang sepe-

ti botol parfum atau alat cukur kerap dianggap sebagai barang biasa sehingga luput dari pengawasan.

“Kadang petugas terlena karena menganggap barang seperti parfum atau alat cukur itu biasa, padahal sebenarnya termasuk barang terlarang,” katanya.

Abdul Waris menegaskan, temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh petugas agar pengawasan di dalam lapas semakin diperketat dan tidak ada lagi barang terlarang yang lolos ma-

Lanjut ke Hal: 7

SMK Negeri 3 Baubau Siap Buka Enam Jurusan untuk SPMB 2026/2027, Seni Tari Jadi Program Baru Unggulan dan Pertama di Sultra



Kepala SMK Negeri 3 Baubau, Dra. Rosmawati, M.Pd.

Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Sekolah SMK Negeri 3 Baubau siap membuka Enam program keahlian Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Selain mempertahankan jurusan yang sudah ada, sekolah tersebut juga menghadirkan jurusan baru seni tari yang diklaim menjadi satu-satunya program unggulan di tingkat SMK di Sulawesi

Tenggara (Sultra).

Kepala SMK Negeri 3 Baubau, Dra. Rosmawati, M.Pd., mengatakan saat ini terus mematangkan persiapan SPMB sambil menunggu petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Sultra. Meski juknis resmi belum diterbitkan, pihak sekolah mulai melakukan sosialisasi ke sejumlah SMP sejak April 2026. Pihak sekolah telah menyiapkan brosur dan tim sosialisasi untuk memperkenalkan program

keahlian yang tersedia di sekolah tersebut.

“Kami masih menunggu juknis dari Dinas Pendidikan Provinsi, tetapi anak-anak bersama guru sudah melakukan sosialisasi ke SMP-SMP sejak bulan April,” ujar Rosmawati saat diwawancara pada awak media (9/5/2026).

Menurutnya, penerimaan siswa baru diperkirakan dimulai pada akhir

Lanjut ke Hal: 7

Hilirisasi Aspal Buton Menguat, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Ambil Peran Strategis Nasional

selama ini dinilai lebih banyak berkembang di luar wilayah penghasil.

Dalam agenda itu, Bupati Muhammad Adios didampingi mantan Penjabat Bupati Buton periode 2022-2023, Drs. Basiran, M.Si. Informasi mengenai pertemuan tersebut pertama kali disampaikan melalui akun media sosial pribadi Basiran Lazaidi.

“Pemerintah daerah ingin memastikan Aspal Buton tidak lagi hanya keluar sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah di daerah sendiri agar memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” tulis Basiran dalam keterangannya.

Langkah Buton Selatan muncul di tengah menguatnya aspirasi masyarakat Pulau Buton yang menghendaki hilirisasi Asbuton dilakukan langsung di wilayah penghasil. Polemik mencuat setelah muncul rencana pembangunan fasilitas pengolahan Asbuton di Karawang, Jawa Barat, yang memicu pertanyaan publik mengenai keberpihakan industri-alisasi terhadap daerah penghasil sumber daya alam.

Secara historis, Aspal Buton merupakan salah satu cadangan aspal alam terbesar di dunia. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan cadangan Asbu-

ton diperkirakan mencapai lebih dari 650 juta ton yang tersebar di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Cadangan tersebut telah dikenal sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dan mulai diteliti secara serius pada awal abad ke-20.

Pada era 1970-an hingga 1980-an, pemerintah Indonesia pernah mendorong penggunaan Aspal Buton sebagai substitusi aspal impor untuk pembangunan jalan nasional. Namun, pemanfaatannya belum berkembang maksimal akibat keterbatasan teknologi pengolahan dan dominasi penggunaan aspal minyak impor dalam proyek infrastruktur nasional.

Di tingkat internasional, sejumlah negara penghasil aspal alam seperti Trinidad and Tobago berhasil mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya lokal melalui pengolahan modern dan ekspor produk turunan bernilai tinggi. Model tersebut kini mulai menjadi rujukan dalam pengembangan industri Asbuton nasional.

Dalam pertemuan di Jakarta itu, PT Jaya Trade Indonesia memaparkan pengalaman perusahaan dalam industri perdagangan aspal nasional. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk yang tel-

ah bergerak di bidang distribusi aspal minyak sejak 1971.

Perusahaan itu juga memiliki jaringan distribusi nasional melalui 19 Terminal Aspal Curah (TAC) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, PT Jaya Trade Indonesia telah melakukan pengembangan teknologi ekstraksi Aspal Buton sejak 2010 melalui pengoperasian mini plant.

“Perusahaan menargetkan peningkatan kapasitas produksi menuju skala industri sekitar 25 ribu hingga 30 ribu metrik ton per tahun,” demikian penjelasan pihak perusahaan dalam pemaparannya.

Melalui anak usahanya, PT Sarana Sumber Daya Utama, perusahaan juga mengklaim telah melakukan uji coba penggunaan Aspal Buton ekstraksi pada ruas jalan di kawasan Bintaro, Tangerang, sejak 2017.

“Hingga sekarang kondisi jalan tersebut masih baik dan belum mengalami kerusakan signifikan,” ungkap pihak perusahaan dalam presentasinya kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Pemerintah daerah menyatakan siap memberikan dukungan terhadap kebutuhan investasi, termasuk memfasilitasi koordinasi lintas kementerian, pengawasan proses perizinan, hingga

penyiapan dokumen pendukung terkait kawasan tambang dan kawasan industri yang akan dikembangkan di Buton Selatan.

Langkah itu dipandang penting mengingat tantangan utama pengembangan industri Asbuton selama ini berada pada aspek perizinan usaha pertambangan (IUP), sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta kepastian investasi jangka panjang.

Jika terealisasi, pembangunan industri pengolahan Aspal Buton di Buton Selatan diproyeksikan mampu memperkuat rantai pasok aspal nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal minyak yang selama ini masih cukup besar untuk kebutuhan pembangunan jalan nasional.

Selain itu, kehadiran industri pengolahan Asbuton di Pulau Buton diyakini dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal, hingga mendorong pertumbuhan kawasan industri baru di Sulawesi Tenggara.

Di tengah dinamika kebijakan hilirisasi nasional yang terus berkembang, langkah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menunjukkan upaya daerah untuk mengambil posisi lebih strategis dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. (*)

SMK Negeri 3 Baubau Siap Buka Enam Jurusan untuk SPMB 2026/2027, Seni Tari Jadi Program Baru Unggulan dan Pertama di Sultra

Juni 2026, setelah pembagian rapor kelas X dan XI pada 20 Juni mendatang.

“Untuk tahun ajaran baru, sekolah menyiapkan kuota rombongan belajar (rombel) yang relatif sama seperti tahun sebelumnya,” tuturnya.

“Jurusan Tata Busana disiapkan lima rombel, Kuliner dua rombel, Tata Kecantikan tiga rombel, Akomodasi Perhotelan satu rombel, serta Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dua rombel,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, minat masyarakat terhadap jurusan TKJ cukup tinggi sejak pertama kali dibuka awal sekitar 15 siswa, jumlah pendaftar mencapai 31 orang.

“Kalau peminatnya meningkat, kami akan bernegosiasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi supaya dibukakan tambahan kuota

rombel,” katanya.

Selain fokus pada penerimaan siswa baru, sekolah juga mencatat peningkatan prestasi akademik lulusan. Tahun ini, enam siswa berhasil lolos perguruan tinggi negeri melalui jalur bebas tes. Mereka diterima di Universitas Halu Oleo dan Universitas Negeri Makassar sesuai bidang keahlian masing-masing.

Salah satu program baru yang menjadi perhatian sekolah adalah pembukaan jurusan Seni Tari. Rosmawati menjelaskan, jurusan tersebut dibuka karena kebutuhan tenaga guru seni tari dinilai masih sangat kurang, khususnya di Kota Baubau dan Sulawesi Tenggara.

“Jurusan Seni Tari ini punya prospek yang bagus karena ada kelanjutannya di perguruan tinggi, seperti di Universitas Negeri Makassar dan juga di

Jogja,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada SMK di Sulawesi Tenggara yang membuka jurusan Seni Tari, sehingga pihak sekolah berharap program tersebut dapat menarik minat siswa baru.

Dengan tambahan jurusan baru tersebut, kini SMK Negeri 3 Baubau memiliki enam program keahlian, yakni Tata Busana, Kuliner, Tata Kecantikan, Akomodasi Perhotelan, Teknik Komputer dan Jaringan, serta Seni Tari.

Rosmawati berharap keberadaan berbagai jurusan tersebut dapat memberi peluang lebih luas bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, maupun berwirausaha.

“Prospeknya sangat menjanjikan. Anak-anak bisa melanjutkan kuliah, bisa bekerja, dan juga bisa berwirausaha,” tutup Rosmawati. (*)

Razia Kamar Binaan Lapas Baubau, Petugas Temukan Botol Kaca hingga Cutter

suk.

Terkait pelaksanaan razia, pihak lapas membaginya dalam dua kategori, yakni razia internal dan eksternal. Razia internal dilakukan secara rutin hingga dua kali dalam sepekan, sementara razia eksternal dilakukan berdasarkan perintah tertentu maupun momentum khusus.

“Kalau sifatnya internal bisa dua kali seminggu. Kalau eksternal biasanya ada perintah atau momen tertentu dan dilakukan

secara rahasia,” jelasnya.

Selain razia rutin, lapas juga melaksanakan pengeledahan insidental sewaktu-waktu apabila terdapat laporan atau informasi mengenai dugaan keberadaan barang terlarang.

“Razia ini tidak mengenal waktu. Kalau ada laporan atau informasi, saat itu juga langsung kami lakukan razia,” tambahnya.

Sementara itu, bagi warga binaan yang terbukti memiliki barang terlarang, pihak lapas akan melakukan

pemeriksaan terlebih dahulu melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum menjatuhkan sanksi.

Menurut Abdul Waris, pelanggaran kepemilikan handphone termasuk kategori berat. Warga binaan yang terbukti melanggar dapat ditempatkan di sel khusus serta kehilangan hak integrasi dan remisi.

“Kalau HP termasuk pelanggaran berat. Bisa langsung dimasukkan ke sel dan tidak mendapatkan hak integrasi maupun remisi,” tegasnya. (*)

Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Revitalisasi Gedung Heritage dan Layanan Kominfo

Menurut dia, Dinas Kominfo memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan penyebaran informasi publik. Karena itu, infrastruktur dan kenyamanan lingkungan kerja harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dalam peninjauan lapangan, Wakil Wali Kota menemukan adanya perbedaan kondisi fisik bangunan pada kompleks kantor tersebut. Area yang ditempati Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dinilai relatif lebih baik dibandingkan ruang kerja Dinas Kominfo yang membutuhkan pembenahan.

Ia menegaskan revitalisasi gedung

heritage akan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak nilai sejarah bangunan yang menjadi bagian dari identitas Kota Baubau. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan aspek konservasi dalam proses penataan nantinya.

“Bangunan ini memiliki nilai sejarah bagi Kota Baubau. Karena itu pembenahan harus dilakukan dengan tetap menjaga bentuk dan karakter aslinya,” katanya.

Selain membahas kondisi internal Kominfo, Wa Ode Hamsinah Bolu juga memaparkan perkembangan program Sekolah Rakyat yang saat ini sedang diperjuangkan Pemerintah Kota Baubau agar masuk dalam prioritas pembangunan pe-

merintah pusat tahun 2026.

Menurut dia, pemerintah daerah telah menyelesaikan sebagian besar persyaratan administrasi dan saat ini fokus pada penyempurnaan legalitas lahan melalui proses sertifikasi.

“Terkait lahan tidak ada kendala berarti. Kami sedang merampungkan administrasi sertifikat agar seluruh syarat dari pemerintah pusat dapat dipenuhi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, perhatian juga diarahkan pada fasilitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di kawasan yang sama. Pemerintah Kota Baubau menilai fasilitas pelayanan tersebut sudah perlu ditingkatkan karena tingginya kebutuhan penanga-

nan kasus perempuan dan anak di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara.

Wa Ode Hamsinah Bolu menjelaskan, posisi Baubau sebagai pusat konektivitas kawasan kepulauan menyebabkan banyak kasus perlindungan perempuan dan anak dari daerah sekitar dirujuk ke kota tersebut. “Dengan akses transportasi yang terpusat di Baubau, banyak penanganan kasus dari wilayah kepulauan bermuara di sini. Karena itu fasilitas pelayanan yang representatif menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Baubau bersama Kepala Dinas DP3AKB Abdul Rahman dijadwalkan melakukan koordinasi

dan sounding dengan kementerian terkait guna mengupayakan bantuan pembangunan fasilitas pelayanan yang lebih memadai dari pemerintah pusat.

Secara historis, revitalisasi bangunan heritage untuk kepentingan pelayanan publik telah menjadi tren di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah kota seperti Semarang, Surabaya, dan Jakarta mulai mengintegrasikan bangunan cagar budaya dengan fungsi pelayanan modern tanpa menghilangkan nilai historisnya. Pendekatan serupa juga diterapkan di sejumlah negara Eropa seperti Belanda dan Prancis

yang mempertahankan bangunan bersejarah sebagai pusat administrasi dan pelayanan masyarakat.

Di tingkat nasional, penguatan layanan digital pemerintahan juga menjadi bagian dari agenda transformasi birokrasi Indonesia sejak diterbitkannya kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peran Dinas Kominfo di daerah menjadi semakin penting dalam mendukung keterbukaan informasi, integrasi data, hingga pelayanan publik berbasis teknologi.

Sementara itu, isu perlindungan perempuan dan anak juga menjadi perhatian

global. Data UNICEF dan UN Women dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kebutuhan layanan perlindungan terpadu di kawasan perkotaan dan wilayah transit, terutama daerah yang menjadi pusat mobilitas masyarakat antarpulau maupun antarwilayah.

Langkah Pemerintah Kota Baubau melakukan pembenahan fasilitas pelayanan dan penguatan komunikasi internal aparaturnya dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas birokrasi daerah sekaligus menjawab tantangan pelayanan publik di kawasan kepulauan Sulawesi Tenggara. (*)

Puan Dorong DPR Selidiki Pembubaran Nobar Film Dokumenter Pesta Babi



Ketua DPR RI Puan Maharani memerintahkan komisi terkait untuk meminta penjelasan soal ramai-ramai pembubaran film 'Pesta Babi' di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta komisi terkait di parlemen segera menelusuri kasus pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi yang terjadi di sejumlah daerah. Permintaan tersebut disampaikan menyusul polemik yang berkembang luas di tengah masyarakat terkait pelarangan pemutaran film yang menyoroti persoalan lingkungan dan masyarakat adat di Papua.

Puan menilai persoalan itu perlu mendapatkan perhatian serius karena telah menjadi isu publik yang memicu perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, batas kewenangan pelarangan film, serta sensitivitas sosial di masyarakat. Menurut dia, DPR perlu meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

"Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," kata Puan di kompleks parlemen, Selasa (12/5).

Polemik bermula setelah sejumlah kegiatan pemutaran film dokumenter Pesta Babi dibubarkan di beberapa wilayah. Hingga kini, tercatat sedikitnya empat lokasi pembubaran, yakni di

Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, Universitas Islam Negeri Mataram, serta di kawasan Ternate Tengah, Maluku Utara.

Film dokumenter tersebut merupakan karya sineas dan mantan jurnalis Dandhy Dwi Laksono yang dikenal kerap mengangkat isu sosial, lingkungan, dan hak masyarakat adat. Dalam film itu, Dandhy menyoroti alih fungsi kawasan hutan di Papua menjadi perkebunan industri atas nama program ketahanan pangan dan transisi energi.

Selain menggambarkan dampak kerusakan lingkungan, film tersebut juga memperlihatkan perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi industri berskala besar. Tema itu dinilai sensitif karena berkaitan dengan isu agraria, pembangunan, hingga hak asasi manusia.

Puan mengaku belum menonton film tersebut secara langsung. Namun, ia menilai judul film Pesta Babi berpotensi menimbulkan sensitivitas di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Karena itu, menurut dia, semua pihak perlu mengantisipasi persoalan tersebut secara bijak.

"Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi

si dengan baik juga," ujar Puan.

Di tengah kontroversi tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan film tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Pigai, pembatasan terhadap karya film hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan sesuai mekanisme undang-undang.

"Film itu hanya boleh dilarang menurut keputusan pengadilan, menurut undang-undang," kata Pigai.

Pigai menambahkan, bahkan, pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum tidak dibenarkan melakukan pelarangan pemutaran film di ruang publik. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa kebebasan berekspresi tetap dilindungi selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam sejarah perfilman nasional, polemik pelarangan atau pembatasan film bukan kali pertama terjadi. Pada masa Orde Baru, sejumlah film dokumenter dan karya kritik sosial pernah mengalami pembatasan tayang, termasuk film-film bertema politik dan pelanggaran HAM. Salah satu kasus yang banyak disorot ialah pelarangan pemutaran film dokumenter *The Act*

of Killing atau Jagal yang mengangkat tragedi 1965.

Di tingkat internasional, pembatasan pemutaran film juga pernah memicu perdebatan besar mengenai kebebasan berekspresi. Film *The Last Temptation of Christ* karya Martin Scorsese sempat menuai protes di sejumlah negara pada akhir 1980-an karena dianggap sensitif terhadap isu agama.

Demikian pula film satir politik *The Interview* di Amerika Serikat yang memicu kontroversi diplomatik pada 2014.

Pengamat menilai polemik film Pesta Babi menunjukkan bahwa ruang kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama ketika bersinggungan dengan isu agama, identitas sosial, dan kepentingan politik. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan pentingnya menyikapi karya seni dan dokumenter melalui dialog terbuka serta mekanisme hukum yang berlaku.

Kasus pembubaran nobar tersebut kini menjadi perhatian publik nasional. DPR RI bersama pemerintah diharapkan dapat mencari solusi yang mengedepankan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan sensitivitas sosial di masyarakat. (*)

Wapres Gibran Miliki Aset Rp27,9 Miliar Berdasarkan Data KPK



Wapres Gibran melaporkan harta kekayaan

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp27,9 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 23 Maret 2026. Mayoritas kekayaan tersebut berasal dari aset properti berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah.

Berdasarkan data LHKPN, total kekayaan Gibran mencapai Rp27.915.654.176. Dalam laporan itu, Gibran juga tercatat tidak memiliki utang. Nilai kekayaan tersebut menempatkan Gibran sebagai salah satu pejabat negara dengan aset properti cukup dominan dibandingkan instrumen lainnya.

"Seluruh aset yang dilaporkan merupakan hasil sendiri," demikian keterangan yang tercantum dalam dokumen LHKPN Gibran yang diumumkan KPK.

Aset terbesar yang dimiliki Wapres berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp17,44 miliar. Properti tersebut terdiri atas empat bidang tanah dan bangunan yang berada di Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen. Selain itu, Gibran juga memiliki tiga bidang tanah di Surakarta dengan luas masing-masing 113 meter persegi, 896 meter persegi, dan 1.124 meter persegi.

Selain properti, Gibran juga melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp5,552 miliar. Pada kategori kas dan setara kas, ia mencatatkan aset sebesar Rp4,357 miliar. Adapun harta bergerak

lainnya tercatat senilai Rp280 juta.

Untuk alat transportasi dan mesin, Gibran melaporkan kepemilikan tujuh kendaraan dengan total nilai Rp286,5 juta. Kendaraan itu terdiri atas empat unit mobil dan tiga unit sepeda motor.

Empat mobil yang tercantum dalam laporan yakni Toyota Avanza tahun 2016 senilai Rp75 juta, Toyota Avanza tahun 2012 seharga Rp50 juta, Isuzu Panther tahun 2012 senilai Rp55 juta, serta Daihatsu Grand Max tahun 2015 senilai Rp55 juta.

Sementara itu, kendaraan roda dua yang dimiliki meliputi Royal Enfield tahun 2017 seharga Rp40 juta, Honda CB-125 keluaran 1974 senilai Rp5 juta, dan Honda Scoopy tahun 2015 seharga Rp6,5 juta.

"Tidak terdapat catatan utang dalam laporan harta kekayaan tersebut," tulis data resmi LHKPN yang dipublikasikan KPK.

"Gibran mulai menjabat sebagai Wakil Presiden RI setelah dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pemilihan Presiden 2024 usai mengungguli pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kewajiban pelaporan LHKPN sendiri menjadi bagian dari upaya transparansi dan pencegahan korupsi di lingkungan pejabat negara. Sistem tersebut mulai diterapkan secara luas setelah reformasi 1998 dan diperkuat melalui pembentukan KPK pada 2002.

Dalam sejarahnya, Indonesia termasuk negara di Asia Teng-

gara yang mewajibkan pejabat publik melaporkan harta kekayaan secara berkala. Praktik serupa juga diterapkan di sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan, dan Filipina sebagai instrumen pengawasan publik terhadap penyelenggara negara.

Di Indonesia, keterbukaan laporan kekayaan pejabat semakin mendapat perhatian publik dalam satu dekade terakhir, terutama setelah perkembangan teknologi digital memungkinkan masyarakat mengakses data LHKPN secara daring melalui sistem elektronik KPK.

"Pelaporan harta kekayaan merupakan bentuk akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat," ujar seorang pejabat KPK dalam sejumlah kesempatan sosialisasi mengenai LHKPN.

Sebagai putra suling Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran mulai dikenal publik saat menjabat Wali Kota Surakarta sebelum akhirnya maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Karier politiknya berkembang dalam waktu relatif singkat hingga kini menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.

Publikasi LHKPN pejabat negara dinilai penting untuk menjaga integritas pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selain menjadi instrumen pengawasan, laporan tersebut juga berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap potensi konflik kepentingan dan pertumbuhan kekayaan pejabat selama menjabat. (*)

Mentan Kucurkan Bantuan Rp10 Miliar untuk Banjir dan Sawah Sultra



Pemerintah pusat menyalurkan bantuan senilai sekitar Rp10 miliar untuk pemulihan sektor pertanian dan penanganan dampak banjir di Sulawesi Tenggara.

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pemerintah pusat menyalurkan bantuan senilai sekitar Rp10 miliar untuk pemulihan sektor pertanian dan penanganan dampak banjir di Sulawesi Tenggara. Bantuan tersebut diserahkan langsung Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman saat meninjau kawasan terdampak banjir di Desa Amohalo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dan bantaran Kali Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Selasa (12/5/2026).

Dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua bersama sejumlah pejabat daerah, aparat kepolisian, dan unsur pemerintah setempat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan korban banjir dan percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak genangan.

Di kawasan Kali Wanggu, Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan tunai bagi masyarakat terdampak banjir. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan darurat warga, termasuk penyediaan makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lainnya.

"Terus ada juga untuk pembelian mi instan, karena saya pernah merasakan bencana. Ada Rp500 juta seadanya, karena ini adalah

kampung halaman saya," ujar Amran di hadapan warga terdampak banjir.

Selain bantuan tunai, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional juga menyalurkan bantuan pangan berupa 30 ton beras, 1,5 ton minyak goreng, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Bantuan itu diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat.

Menurut Amran, pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pemulihan sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber utama penghidupan masyarakat di Sulawesi Tenggara. Pemerintah menyiapkan alat dan mesin pertanian, benih, bibit, hingga bantuan alat pengering gabah atau dryer untuk gudang Bulog.

"Alat mesin pertanian, benih, bibit untuk 2.000 hektare. Kurang lebih Rp10 miliar bantuan yang kami salurkan termasuk dryer untuk gudang Bulog juga," katanya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Desa Amohalo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Di lokasi itu, Menteri Pertanian melihat langsung kondisi areal persawahan yang tergenang banjir. Sejumlah petani dilaporkan mengalami gagal tanam akibat luapan air yang merendam lahan dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah pusat

juga berjanji mempercepat penanganan infrastruktur pengendali banjir, terutama pembangunan dan perbaikan tanggul di kawasan terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah banjir kembali merendam permukiman warga maupun lahan pertanian produktif.

"Ini harus dibereskan sumber masalahnya semua. Tanggul dibangun, kami sudah telepon Dirjen Kementerian PU yang bertanggung jawab. Dananya siap, alatnya sudah siap. Kami minta satu minggu, paling lambat dua minggu selesai," ujar Amran.

Ia menambahkan, pemerintah akan mendukung program optimalisasi lahan sawah pascabanjir guna menjaga produksi pangan daerah tetap stabil. Upaya itu dinilai penting mengingat Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah penyangga kebutuhan pangan di kawasan timur Indonesia.

Secara historis, banjir di wilayah Kota Kendari dan Konawe Selatan kerap terjadi akibat tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran sungai. Pada 2019 lalu, Sulawesi Tenggara pernah mengalami banjir besar yang menyebabkan ribuan warga mengungsi dan merusak infrastruktur serta lahan pertanian di berbagai kabupaten dan kota.

Dalam konteks nasional, pemerintah beberapa tahun terakhir terus memperkuat program mitigasi bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya ancaman perubahan iklim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat banjir masih menjadi bencana paling dominan di Indonesia setiap tahun, terutama saat musim hujan dengan curah tinggi.

Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah negara di dunia. Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) mencatat perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem, termasuk banjir besar yang melanda kawasan Asia, Eropa, hingga Amerika dalam satu dekade terakhir.

"Kami datang untuk memberikan solusi. Terkait seluruh masalah pangan sudah kami putuskan semua," kata Amran menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menangani dampak banjir di Sulawesi Tenggara.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Wali Kota Kendari, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Kota Kendari, Wakapolda Sultra, Kapolres Kendari, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (*)

Bapanas Kirim Bantuan Pangan bagi 10.405 Warga Terdampak Banjir Sultra



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pemerintah mulai mendistribusikan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak banjir di enam kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (13/5/2026). Bantuan tersebut terdiri atas 52 ton beras dan 3.060 liter minyak goreng yang disalurkan melalui program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Penyaluran bantuan dilakukan setelah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelesaikan koordinasi percepatan penanganan dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sultra dalam beberapa pekan terakhir.

Sebanyak 10.405 jiwa atau 3.060 kepala keluarga tercatat sebagai penerima bantuan. Distribusi bantuan mencakup 33 kecamatan yang tersebar di enam daerah terdampak banjir.

Wilayah penerima bantuan meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, serta Kabupaten Kolaka Timur.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ari Sismanto, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sultra setelah adanya koordinasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

"Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut arahan gubernur setelah berkoordinasi dengan Kepala Bapanas terkait percepatan penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat terdampak banjir," kata Ari dalam rapat koordinasi di

Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Selasa (12/5/2026).

Rapat itu turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Sultra, Parinringi, perwakilan BPBD, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, serta pimpinan wilayah Perum Bulog Sultra.

Menurut Ari, bantuan beras akan disalurkan kepada seluruh warga terdampak dengan total alokasi mencapai 52 ton. Sementara bantuan minyak goreng diberikan sebanyak satu liter untuk setiap kepala keluarga penerima.

"Bantuan minyak goreng disiapkan sebanyak 3.060 liter dengan skema satu liter per kepala keluarga," ujarnya.

Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan BPBD di masing-masing kabupaten/kota akan mengambil bantuan di gudang Bulog sesuai wilayah distribusi.

Khusus untuk Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara, pengambilan bantuan dipusatkan di gudang Bulog Kota Kendari sebelum didistribusikan langsung kepada masyarakat terdampak.

Ari menegaskan pemerintah berupaya memastikan distribusi bantuan berjalan cepat agar kebutuhan pangan warga selama masa tanggap darurat tetap terpenuhi.

"Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir sekaligus menjaga ketersediaan pangan di wilayah terdampak," katanya.

Kebijakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah tersebut diputuskan setelah Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, melakukan kunjungan kerja ke Sultra pada

Selasa (12/5/2026) untuk meninjau dampak banjir di kawasan pertanian dan permukiman warga.

Dalam kunjungan itu, Amran melihat langsung sejumlah area sawah yang terendam banjir serta kondisi permukiman warga yang terdampak cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir.

Secara historis, program Cadangan Pangan Pemerintah telah menjadi instrumen nasional dalam penanganan darurat pangan sejak diperkuat melalui kebijakan ketahanan pangan nasional pascareformasi. Pemerintah pusat melalui Bapanas dan Bulog kerap menggunakan skema CPP untuk membantu daerah terdampak bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.

Pada 2021, misalnya, pemerintah menyalurkan cadangan beras pemerintah ke sejumlah wilayah terdampak banjir di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Skema serupa juga dilakukan saat penanganan dampak El Niño yang memengaruhi produksi pangan nasional pada 2023 dan 2024.

Secara global, bantuan pangan darurat menjadi instrumen penting dalam penanganan krisis kemanusiaan akibat bencana alam. Organisasi Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa secara rutin menyalurkan bantuan pangan ke negara-negara terdampak banjir besar, seperti Pakistan pada 2022 dan Bangladesh pada 2024.

Pemerintah berharap distribusi bantuan pangan di Sultra dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak banjir sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pokok di tengah kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem. (*)

Pemkab Buteng dan Kejari Buton Perkuat Tata Kelola Berbasis Hukum



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah memperkuat sistem tata kelola pemerintahan dan pengawasan hukum melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Buton di Aula Pancana Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa (12/5/2026). Kerja sama tersebut difokuskan pada pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah serta penyusunan produk hukum berbasis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Penandatanganan MoU itu turut dirangkaikan dengan penyuluhan hukum daerah yang membahas penerapan sanksi pidana dan denda dalam pembentukan regulasi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pemerintah daerah menilai regulasi baru tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar kebijakan publik tidak bertentangan dengan norma hukum nasional.

Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, S.STP., M.Si., mengatakan sinergi dengan Kejaksaan Negeri Buton merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum sejak tahap perencanaan.

"Hukum harus menjadi panglima dalam setiap proses pembangunan daerah. Pendampingan sejak awal penting agar seluruh kebijakan tetap berada pada koridor aturan," kata Azhari dalam sambutannya.

Menurut dia, kerja sama tersebut memberi ruang bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkonsultasi dan meminta pendampingan hukum kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Buton dalam pelaksanaan proyek strategis.

Ia menyebut sejumlah instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan dapat memanfaatkan mekanisme tersebut guna meminimalkan potensi pelanggaran administrasi maupun hukum.

"Ini bukan untuk melindungi pelanggaran, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan lebih tertib, transparan, dan berkualitas," ujar Azhari. Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Nedy Andih, S.H., M.H., menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam memperkuat sinergi kelembagaan demi mendukung prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Sterry menjelaskan, kerja sama tersebut mengacu pada Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dalam aturan itu, Kejaksaan memiliki kewenangan mewakili negara di bidang perdata dan tata usaha negara.

"MoU ini bersifat preventif agar ke-

bijakan pemerintah tetap sesuai aturan dan mampu menekan risiko pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program pembangunan," kata Sterry.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan mampu diterapkan secara konkret dalam setiap proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Armin, jajaran pejabat Kejaksaan Negeri Buton, para kepala OPD, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Buton Tengah.

Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai semakin penting setelah pemerintah pusat mulai menerapkan KUHP baru yang disahkan pada 2023. Regulasi tersebut menjadi tonggak reformasi hukum pidana nasional setelah Indonesia selama puluhan tahun masih menggunakan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda yang diberlakukan sejak 1918.

Secara historis, pembaruan KUHP Indonesia telah dibahas sejak era 1960-an. Namun, proses legislasi berjalan panjang karena pemerintah dan DPR harus menyesuaikan substansi hukum dengan perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat modern.

Dalam konteks internasional, sejumlah negara juga melakukan reformasi hukum pidana untuk menye-

suaikan dinamika sosial dan tata kelola pemerintahan modern. Jepang, misalnya, beberapa kali merevisi sistem pidananya sejak pasca-Perang Dunia II untuk memperkuat transparansi dan kepastian hukum administrasi negara. Sementara itu, Belanda sebagai negara asal KUHP lama Indonesia telah lebih dahulu memperbarui banyak ketentuan pidana agar sesuai dengan perkembangan hukum Eropa kontemporer.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai pendekatan preventif melalui pendampingan hukum dapat mengurangi potensi korupsi, sengketa administrasi, dan kesalahan prosedur dalam proyek pembangunan daerah. Model kerja sama serupa juga mulai diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Melalui nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan yang lebih tertib secara administrasi maupun hukum.

Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah di tengah tuntutan transparansi dan profesionalisme birokrasi yang semakin tinggi di era modern. (*)

BPS dan Pemkab Buton Tengah Bersinergi Benahi Statistik Sektor



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mulai memperkuat tata kelola statistik sektoral sebagai fondasi pembangunan daerah berbasis data. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Pemkab Buton Tengah menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Tengah untuk mempercepat peningkatan nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2026.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Kantor Diskominfo Statistik dan Persandian Buton Tengah, Selasa (12/5/2026). Forum itu sekaligus menjadi momentum peluncuran gagasan inovasi daerah bertajuk "KLINIK DATA" sebagai pusat konsultasi dan pendampingan pengelolaan data bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemkab Buton Tengah menargetkan kenaikan nilai EPSS dari kategori "Cukup" menuju kategori 'Baik'. Target itu dinilai penting karena kualitas statistik sektoral menjadi salah satu indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di daerah.

Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian Buton Tengah menegaskan, penguatan kualitas data tidak lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan kebutuhan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan. "Data yang akurat dan terpadu menjadi dasar utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, seluruh OPD harus memiliki standar pengelolaan data yang sama," ujarnya dalam forum tersebut.

Dalam rapat itu,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai perangkat daerah percontohan atau pilot project peningkatan kualitas data sektoral di lingkungan Pemkab Buton Tengah.

Pemilihan dua OPD tersebut bukan tanpa alasan. Kedua instansi dinilai memiliki peran vital karena menghasilkan data pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan hingga pelayanan kesehatan.

Pihak BPS Kabupaten Buton Tengah menyatakan kesiapan mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola statistik sektoral agar selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, yakni data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Peningkatan nilai EPSS bukan hanya mengejar angka penilaian, tetapi bagaimana membangun budaya kerja berbasis data di seluruh perangkat daerah," kata perwakilan BPS dalam rapat tersebut.

Secara nasional, penguatan statistik sektoral mulai menjadi perhatian pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan itu lahir untuk menyelesaikan persoalan perbedaan data antarinstansi yang selama bertahun-tahun kerap menghambat sinkronisasi pembangunan nasional maupun daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat juga terus mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Integrasi data menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi

si agar pengambilan keputusan lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti.

Secara historis, negara-negara maju seperti Korea Selatan, Estonia, dan Singapura telah lebih dulu mengembangkan sistem integrasi data pemerintahan berbasis digital. Reformasi data di negara-negara tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi pemerintahan.

Di Indonesia, sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan kualitas statistik sektoral umumnya mampu mempercepat penyusunan program pembangunan karena memiliki basis data yang lebih valid dan terukur. Pemerintah daerah juga lebih mudah menentukan prioritas anggaran dan memetakan kebutuhan masyarakat secara presisi.

Melalui inovasi 'KLINIK DATA', Pemkab Buton Tengah berharap seluruh OPD memperoleh ruang pembinaan dan konsultasi teknis terkait pengelolaan data. Program itu juga diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dalam menghasilkan data yang berkualitas.

"Kami optimistis melalui kolaborasi bersama BPS dan seluruh perangkat daerah, kualitas data sektoral di Buton Tengah akan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan yang tepat sasaran," ujar salah satu peserta rapat.

Penguatan tata kelola data sektoral tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Buton Tengah dalam membangun pemerintahan modern yang transparan, adaptif, dan berbasis teknologi informasi. Dengan data yang valid dan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (*)

Kemenkes Rombak Sistem Internsip Dokter, Jam Kerja Dibatasi 40 Jam



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menetapkan langkah reformasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program internsip dokter di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil setelah munculnya kasus kematian sejumlah dokter muda yang tengah menjalani masa internsip di rumah sakit.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga para dokter yang meninggal dunia saat menjalani program tersebut. Ia menyebut peristiwa ini menjadi peringatan serius terhadap sistem pembelajaran klinis di Indonesia.

"Pemerintah sangat berduka atas wafatnya para dokter internsip. Ini menjadi alarm bagi kita semua untuk memperbaiki sistem yang ada," ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta.

Program internsip sendiri merupakan tahap wajib bagi lulusan profesi dokter sebelum memperoleh izin praktik mandiri. Sistem ini telah diterapkan di Indonesia sejak reformasi pendidikan kedokteran awal 2010-an sebagai bagian dari penyesuaian standar global medical internship atau housemanship.

Namun, dalam

evaluasi terbaru Kemenkes, ditemukan sejumlah persoalan serius terkait beban kerja, sistem supervisi, dan ketimpangan fasilitas antar rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan dokter muda.

Budi menegaskan bahwa budaya kerja yang tidak sehat di lingkungan rumah sakit tidak boleh lagi terjadi. Ia menekankan bahwa pendidikan dokter harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan pembelajaran yang manusiawi.

"Budaya kerja yang buruk tidak boleh terus dibiarkan, baik dalam internsip maupun pendidikan dokter spesialis. Ini harus dibenahi secara sistemik," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Kemenkes membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan unsur internal kementerian, organisasi profesi, hingga akademisi kedokteran. Tim ini bertugas menelusuri penyebab dan faktor yang memengaruhi kejadian tersebut secara menyeluruh.

Investigasi dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada peserta internsip, dokter pendamping, pihak rumah sakit, serta keluarga korban. Pemerintah menegaskan proses ini dilakukan secara terbuka dan independen.

"Kami ingin semua proses berjalan trans-

paran, objektif, dan berbasis fakta di lapangan," kata Budi dalam kesempatan yang sama.

Dari hasil evaluasi awal, pemerintah menetapkan pembatasan jam kerja peserta internsip maksimal 40 jam per minggu. Ketentuan ini juga melarang adanya penumpukan jam kerja yang selama ini kerap terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan.

Selain itu, peserta internsip ditegaskan bukan pengganti tenaga dokter tetap di rumah sakit. Mereka wajib berada di bawah supervisi aktif dokter pembimbing agar proses pendidikan klinis tetap terarah.

Perbaikan juga dilakukan pada aspek kesejahteraan. Kemenkes akan menetapkan standar minimal remunerasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan rumah sakit untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Hak cuti peserta internsip turut diperluas dari empat hari menjadi sepuluh hari tanpa kewajiban perpanjangan masa incernsip. Kebijakan ini juga mencakup cuti sakit dan melahirkan sesuai ketentuan ketenagakerjaan medis.

"Peserta internsip harus mendapatkan perlindungan yang layak. Cuti sakit dan melahirkan tetap dijamin tanpa mengurangi

kompetensi yang harus dicapai," jelas Budi.

Selain aspek administratif, Kemenkes juga memperkuat pemantauan kesehatan dokter muda melalui program pemeriksaan kesehatan berkala dua kali setahun, termasuk pemeriksaan penunjang seperti radiologi dasar.

Secara historis, isu beban kerja dokter muda bukan hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah lebih dulu mereformasi sistem jam kerja dokter residen setelah munculnya kasus kelelahan ekstrem yang berdampak pada keselamatan pasien.

Dengan reformasi ini, pemerintah berharap sistem internsip di Indonesia dapat setara dengan standar internasional yang menempatkan keselamatan tenaga kesehatan dan pasien sebagai prioritas utama.

Kemenkes menegaskan bahwa perbaikan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan perubahan mendasar terhadap budaya kerja di fasilitas kesehatan di Indonesia.

"Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem pendidikan klinis yang aman, profesional, dan manusiawi," tutup Menkes Budi. (*)

Obesitas Bukan Soal Penampilan, Tapi Risiko Penyakit Kronis, 23,4 Persen Dewasa Indonesia Obesitas

JAKARTA, BP-Obesitas kini semakin dipahami sebagai persoalan kesehatan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar isu estetika. Pemerintah Indonesia memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi publik dan perubahan perilaku, seiring meningkatnya angka obesitas di tingkat nasional maupun global.

Upaya tersebut ditegaskan dalam kegiatan Obesity Disease Awareness Event: Harapan yang Meriangankan yang digelar di Aula Siwabessy, Gedung Prof. Dr. Sujudi, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Acara ini menjadi bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko obesitas sejak dini.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan sekitar 23,4 persen orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas, meningkat dari 21,3 persen pada 2018. Tren ini menunjukkan bahwa masalah obesitas terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat prevalensi obesitas dunia telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak 1975. Pada 2022, lebih dari 1 miliar orang di dunia hidup dengan obesitas, menjadikannya salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar abad ini.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa obesitas merupakan faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke.

"Obesitas bukan hanya soal penampilan, tetapi berkaitan langsung dengan risiko penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup dan harapan hidup seseorang," ujar Budi dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa pencegahan harus dimulai dari perubahan gaya hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam pola makan dan aktivitas fisik harian.

"Kalau kita ingin hidup lebih sehat dan lebih panjang umur, maka kita harus mulai menjaga pola makan, menjaga berat badan, dan rutin berolahraga," tegasnya.

Menurut Menkes, pemerintah saat ini mendorong pendekatan berbasis edukasi, termasuk melalui pelabelan nutrisi pada produk makanan dan minuman agar masyarakat lebih mudah memahami kandungan gizi.

"Kita ingin masyarakat lebih sadar terhadap apa yang mereka konsumsi. Informasi gizi harus dibuat sederhana agar mudah dipahami," kata Budi.

Kegiatan tersebut juga menyoroti pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari budaya hidup sehat. Pemerintah mendorong masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan aktivitas insidental.

"Kita harus menjadikan olahraga sebagai movement. Mau lari, jalan kaki, badminton, padel, yang penting tubuh bergerak secara rutin," tambahnya.

Dukungan internasional turut hadir dalam kegiatan ini. Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Sten Friemodt Nielsen, menilai

obesitas sebagai tantangan kompleks yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.

"Obesitas merupakan kondisi kesehatan yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari gaya hidup, lingkungan, hingga akses layanan kesehatan. Penanganannya membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, industri, dan masyarakat," ujarnya.

Ia menekankan bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang, terutama jika dilakukan secara konsisten.

Kerja sama Indonesia dan Denmark di bidang kesehatan juga terus diperkuat melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan mitra internasional dalam pencegahan penyakit tidak menular, termasuk obesitas dan diabetes.

Sebagai catatan historis, Indonesia pertama kali memasukkan obesitas sebagai salah satu fokus utama penyakit tidak menular dalam Rencana Strategis Kesehatan Nasional pada awal 2010-an, seiring meningkatnya tren penyakit metabolik di kawasan Asia Tenggara.

Di tingkat global, WHO sejak 2000-an telah menetapkan obesitas sebagai epidemi non-infeksi yang memerlukan intervensi kebijakan publik, bukan hanya pendekatan klinis individu.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, termasuk melalui edukasi, konsultasi, dan pemeriksaan kesehatan yang turut disediakan dalam acara tersebut. (*)

PT FAREN GRAFIKA

Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
 Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
 Redpel: Prasetyo
 Korlip: Firman
 Redaktur: Kasrun, Rahim
 Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
 Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
 Komisaris: Erna Agule
 Direktur Utama: Andina Latief
 Manager Keuangan: Nabila DAA
 Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
 Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
 Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
 Kepala Biro Buton: La Harman
 Kepala Biro Buton Selatan: Firman
 Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
 Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
 Agen Buton Selatan: Firman
 Agen Buton: Samrihan
 Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

TNI AD Jelaskan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' di Ternate karena Isu Sensitif



TNI bubarkan acara nobar film 'Pesta Babi' di Ternate.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-olemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara, memunculkan perdebatan baru mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan stabilitas keamanan daerah. TNI Angkatan Darat menegaskan penghentian kegiatan dilakukan demi mencegah potensi konflik sosial yang dinilai dapat berkembang di tengah masyarakat majemuk.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate itu berlangsung di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Jumat (8/5) malam. Acara tersebut sedianya diisi pemutaran film dokumenter sekaligus diskusi publik bersama mahasiswa dan komunitas sipil.

Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi, mengatakan aparat keamanan telah melakukan pemantauan sejak awal kegiatan berlangsung. Dari hasil pengecekan, penyelenggara disebut belum mengantongi izin resmi pelaksanaan kegiatan.

Selain persoalan administrasi, aparat juga mempertimbangkan penggunaan judul film dan materi kegiatan yang dianggap sensitif. Menurut Jani, istilah 'Pesta Babi' berpotensi menimbulkan

kesalahpahaman di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan budaya berbeda.

"Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif," kata Jani, Selasa (12/5).

Ia menambahkan, Ternate memiliki sejarah panjang konflik sosial sehingga aparat memilih mengedepankan langkah pencegahan dibanding menunggu situasi berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

"Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara," ujarnya.

Menurut Jani, aparat tidak melarang kegiatan diskusi maupun kebebasan berpendapat selama dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak memunculkan potensi gangguan ketertiban umum. Ia menegaskan koordinasi dengan panitia dilakukan melalui pendekatan persuasif.

"Hingga saat ini aparat keamanan bersama unsur terkait masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali," katanya lagi.

Di sisi lain, Ket-

ua Aji Ternate Yunita Kaunar menilai kehadiran aparat sejak awal acara telah menciptakan tekanan psikologis terhadap panitia dan peserta. Ia menyebut tindakan aparat yang mendokumentasikan peserta membuat suasana diskusi menjadi tidak nyaman.

"Alasan potensi konflik tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan karena acara berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi," ujar Yunita.

Peristiwa tersebut segera memicu perhatian publik nasional, terutama kelompok masyarakat sipil dan organisasi pers yang menilai ruang diskusi publik semestinya tetap dilindungi dalam negara demokrasi. Sejumlah pihak membandingkan kejadian itu dengan praktik pembatasan ruang berekspresi yang pernah terjadi pada era Orde Baru ketika berbagai diskusi, pemutaran film, dan kegiatan mahasiswa kerap dibatasi aparat keamanan.

Secara historis, Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait pembubaran forum diskusi publik. Pada dekade 1980 hingga 1990-an, sejumlah pemutaran film dokumenter dan forum akademik pernah dibubarkan karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Setelah reformasi 1998, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul dijamin lebih luas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ser-

ta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Di tingkat internasional, pembatasan pemutaran film atau diskusi publik juga beberapa kali terjadi di sejumlah negara dengan alasan keamanan dan sensitivitas sosial. Pada 2014, misalnya, pemutaran film *The Interview* di Amerika Serikat sempat menuai ancaman keamanan internasional. Sementara di beberapa negara Asia dan Timur Tengah, film bertema agama dan identitas sosial kerap dibatasi pemerintah guna menghindari konflik horizontal.

Pengamat komunikasi politik menilai kasus di Ternate menunjukkan masih adanya tarik-menarik antara kepentingan menjaga stabilitas daerah dan perlindungan hak sipil warga negara. Dalam sistem demokrasi modern, aparat keamanan dituntut mampu menjaga ketertiban tanpa mengurangi hak masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan secara damai.

Perdebatan mengenai pembubaran nobar film dokumenter itu diperkirakan masih akan berlanjut, terutama terkait mekanisme perizinan kegiatan publik, batas kewenangan aparat keamanan, serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. (*)

Hakim Ungkap Kerugian Rp5,2 Triliun dalam Kasus Chromebook Kemendikbud



Hakim ungkap kerugian negara di kasus korupsi Chromebook era Nadiem Makarim.

JAKARTA, BP-Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengungkap kerugian negara dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2020-2022 mencapai Rp5,2 triliun. Dalam perkara tersebut, terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam divonis empat tahun penjara karena dinilai terlibat dalam proses pengadaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Putusan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5), oleh majelis hakim yang dipimpin Purwanto S. Abdullah bersama hakim anggota Sunoto, Mardiantos, Eryusman, dan Andi Saputra. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 15 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut kerugian negara terutama bersumber dari dugaan penggelembungan harga laptop Chromebook dan pengadaan Chrome Device Management yang dianggap tidak diperlukan dalam sistem pembelajaran digital nasional.

"Secara matematis sederhana menunjukkan adanya mark up sebesar Rp4 juta per unit atau tiga kali lipat dari harga pasar," ujar hakim anggota Sunoto saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim mengungkapkan, pengadaan Chromebook mencapai 1.159.327 unit. Dengan selisih harga sekitar Rp4 juta per unit, potensi kerugian negara disebut mencapai lebih dari Rp4,6 triliun.

Jumlah tersebut bahkan dinilai lebih besar dibanding hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sebelumnya digunakan jaksa sebagai dasar dakwaan. Dalam dakwaan, kerugian akibat kemahalan harga Chromebook disebut sekitar Rp1,5 triliun.

"Perhitungan kerugian negara yang men-

jadi sandaran Penuntut Umum justru bersifat konservatif dan menguntungkan terdakwa," kata hakim dalam persidangan.

Selain dugaan mark up harga, majelis hakim juga menyoroti keterlibatan Ibrahim Arief dalam aktivasi Chrome Device Management atau CDM. Aktivasi perangkat lunak itu dinilai menjadi salah satu instrumen utama yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar US\$44 juta atau setara Rp621 miliar.

Hakim menyebut terdakwa menggunakan posisi dan kewenangannya sebagai engineer leader atau pemimpin teknis untuk memfasilitasi proses pengadaan. Padahal, menurut hakim, terdakwa sebelumnya mengklaim telah mengundurkan diri dari proyek tersebut pada Mei 2020.

"Secara substantif menyimpang dari pengunduran diri yang terdakwa dalilkan terjadi pada 26 Mei 2020," ujar hakim.

Dalam amar putusannya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi 120 hari kurungan kepada Ibrahim Arief. Namun, majelis tidak mengabulkan seluruh tuntutan jaksa, termasuk tuntutan uang pengganti sebesar Rp16,92 miliar.

Putusan tersebut tidak diambil secara bulat. Dua hakim anggota, yakni Eryusman dan Andi Saputra, menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Keduanya menilai unsur pidana dalam perkara itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim Andi Saputra menyebut Ibrahim Arief tidak memiliki hubungan langsung dengan pejabat internal kementerian sebelum tempus delicti berlangsung. Selain itu, terdakwa dinilai tidak terbukti melakukan lobi maupun intervensi terhadap proses penyusunan anggaran pengadaan Chromebook.

"Harga Chromebook yang disampaikan terdakwa hanya mengacu pada marketplace dan bersifat rekomendasi," ujar Andi Saputra da-

lam pendapat berbeda.

Kasus pengadaan Chromebook ini menjadi salah satu perkara besar dalam proyek digitalisasi pendidikan nasional yang digulirkan pemerintah saat pandemi Covid-19. Pada periode 2020-2021, pemerintah mempercepat penggunaan perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh akibat pembatasan aktivitas tatap muka di sekolah.

Secara historis, proyek digitalisasi pendidikan bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara juga pernah menghadapi persoalan serupa. Di Amerika Serikat, misalnya, beberapa distrik pendidikan pernah dikritik karena pembelian perangkat pendidikan berbasis teknologi dengan harga tinggi tanpa kajian kebutuhan yang matang. Di India dan Brasil, proyek digitalisasi sekolah sempat disorot lembaga audit karena lemahnya pengawasan distribusi perangkat teknologi pendidikan.

Di Indonesia sendiri, proyek pengadaan perangkat pendidikan digital sebelumnya pernah menjadi perhatian publik dalam berbagai program bantuan teknologi pendidikan sejak awal 2010-an. Namun, pandemi Covid-19 mempercepat skala belanja negara di sektor teknologi pendidikan sehingga meningkatkan risiko tata kelola dan pengawasan anggaran.

Pengamat kebijakan publik menilai perkara Chromebook menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar setiap program digitalisasi nasional dilakukan melalui kajian kebutuhan yang terukur, transparansi harga, dan pengawasan independen.

Hingga kini, putusan terhadap Ibrahim Arief belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jaksa maupun pihak terdakwa masih memiliki waktu tujuh hari kerja untuk menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. (Amran)

Pos SAR Baubau Diusulkan Naik Status Jadi Kantor SAR Demi Keselamatan Pelayaran untuk Jalur Laut Indonesia Timur, Dapat Dukungan Pemkot



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menyatakan komitmen penuh mendukung peningkatan status Pos SAR Baubau menjadi Kantor SAR definitif guna memperkuat sistem pencarian dan pertolongan di kawasan perairan strategis Indonesia Timur. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara jajaran Pos SAR Baubau dan Wakil Wali Kota Baubau, Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, di ruang kerja Wakil Wali Kota Baubau, Selasa (12/05/2026).

Langkah peningkatan status itu dinilai penting mengingat tingginya aktivitas pelayaran di wilayah Selat Buton dan Laut Banda yang selama ini menjadi jalur utama transportasi laut masyarakat maupun distribusi logistik antarpulau di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Kota Baubau bahkan mulai merampungkan draf surat rekomendasi resmi yang nantinya akan ditandatangani Wakil Wali Kota Baubau setelah kembali dari agenda kedinasan di luar daerah. Surat tersebut menjadi salah satu syarat administratif dalam proses evaluasi kelembagaan Basarnas.

Kepala DanPOS SAR Baubau, Yayan La Ihu, S.H mengatakan, peningkatan status Pos SAR menjadi Kantor SAR bertujuan memperkuat pelayanan penyelamatan

sekaligus meningkatkan kapasitas personel dan kelengkapan alat utama operasi di wilayah perairan rawan kecelakaan laut.

"Hasil pertemuan kami disambut sangat baik. Kami berharap proses ini dapat segera ditindaklanjuti demi keselamatan masyarakat Kota Baubau dan wilayah sekitarnya," ujar Yayan.

Menurut Yayan, kebutuhan penguatan kelembagaan SAR di Baubau tidak bisa lagi ditunda. Selain tingginya intensitas operasi pencarian dan pertolongan, posisi geografis Baubau juga sangat strategis sebagai simpul transportasi laut di kawasan Indonesia Timur.

Data Basarnas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sebagian besar operasi penyelamatan di Indonesia masih didominasi kecelakaan transportasi laut. Wilayah perairan timur Indonesia, termasuk Laut Banda dan Selat Buton, tercatat menjadi jalur dengan mobilitas pelayaran yang cukup padat, terutama kapal penumpang, kapal nelayan, dan kapal barang antarpulau.

Secara historis, penguatan sistem SAR nasional mulai mendapat perhatian besar pascatsunami Aceh tahun 2004 yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Tragedi tersebut mendorong modernisasi sistem pencarian dan pertolongan di Indonesia, termasuk penguatan koordinasi Basarnas

dengan pemerintah daerah di berbagai wilayah rawan bencana dan kecelakaan laut.

Di tingkat internasional, penguatan lembaga pencarian dan pertolongan juga menjadi perhatian negara-negara maritim dunia sejak lahirnya International Convention on Maritime Search and Rescue tahun 1979 yang dirakursai International Maritime Organization (IMO). Konvensi tersebut mendorong setiap negara membangun sistem respons cepat terhadap kecelakaan laut dan keadaan darurat kemanusiaan.

Staf Ahli Wali Kota Baubau Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Dr. Moh. Tasdik, SH, M.Si menegaskan, Kota Baubau memiliki posisi strategis yang sangat mendukung pembentukan Kantor SAR definitif.

"Kami mendukung penuh peningkatan level ini. Mengingat karakteristik Baubau sebagai daerah kepulauan, penguatan kelembagaan SAR akan menjamin respons penyelamatan yang lebih cepat dan optimal bagi masyarakat," kata Tasdik.

Ia menjelaskan, evaluasi terhadap Peraturan Badan Nasional Nomor 19 Tahun 2014 membuka peluang besar bagi daerah strategis seperti Baubau untuk memiliki kantor SAR dengan struktur kelembagaan yang lebih kuat dan definitif.

Selain mempercepat respons penyelamatan, keberadaan

Kantor SAR di Baubau diyakini akan meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Basarnas, pemerintah daerah, TNI, Polri, syahbandar, hingga unsur relawan kemanusiaan di lapangan.

Selama ini, operasi penyelamatan di wilayah Baubau dan sekitarnya masih mengandalkan dukungan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari sebagai satuan kerja induk. Dengan peningkatan status menjadi Kantor SAR, proses mobilisasi personel dan peralatan diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien.

Tasdik juga menilai penguatan institusi SAR sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas transportasi laut. Menurutnya, keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Baubau merupakan daerah kepulauan yang aktivitas lautnya sangat tinggi. Karena itu, penguatan layanan SAR menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan masyarakat," ujarnya.

Pihak Basarnas dan Pemerintah Kota Baubau kini terus memperkuat koordinasi agar seluruh tahapan administrasi dan regulasi dapat segera diselesaikan. Pemerintah daerah berharap peningkatan status tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat sehingga pelayanan pencarian dan pertolongan di wilayah

Indonesia Timur semakin optimal. (*)

Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Himbau OPD Percepat TTE dan Genjot Penyerapan Anggaran



Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mempercepat transformasi pelayanan pemerintahan berbasis digital melalui implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan itu ditegaskan Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Senin (11/05/2026).

Dalam arahnya, Wakil Wali Kota meminta seluruh OPD segera melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau guna mempercepat proses simulasi dan penerapan TTE pada seluruh layanan administrasi pemerintahan.

Menurutnya, percepatan digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.

"Seluruh OPD harus segera bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Kominfo agar implementasi TTE dapat berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik," ujar Wa Ode Hamsinah Bolu di hadapan peserta apel.

Pemerintah pusat sendiri sejak beberapa tahun terakhir terus mendorong penggunaan tanda tangan elektronik dalam sistem birokrasi nasional. Kebijakan tersebut diperkuat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi program nasional dalam reformasi birokrasi digital di Indonesia.

Secara historis, penerapan tanda tangan elektronik mulai berkembang luas

di dunia sejak awal 2000-an, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sebagai bagian dari penguatan layanan pemerintahan digital atau e-government. Estonia menjadi salah satu negara pelopor digitalisasi administrasi publik yang hampir seluruh layanan pemerintahannya telah menggunakan identitas dan tanda tangan digital secara terpadu.

Di Indonesia, transformasi digital pemerintahan semakin dipercepat pascapandemi Covid-19 karena kebutuhan pelayanan administrasi yang cepat, efisien, dan minim kontak fisik. Sejumlah daerah mulai mengintegrasikan TTE dalam layanan surat-menyurat, administrasi kepegawaian, hingga dokumen perizinan.

Selain menyoroti percepatan TTE, Wakil Wali Kota juga memberi perhatian serius terhadap realisasi penyerapan anggaran di masing-masing OPD. Ia menilai pelaksanaan program pemerintah masih perlu dipacu karena saat ini telah memasuki pertengahan triwulan kedua tahun anggaran 2026.

Menurut dia, percepatan belanja daerah harus berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama warga.

"Ini kewajiban kita sebagai pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat. Karena di mana pun saya jalan, masyarakat selalu bertanya kapan perbaikan jalan dilakukan," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya melihat masih adanya masyarakat yang secara swadaya melakukan penambalan jalan di depan rumah mereka akibat kerusakan yang belum tertangani pemerintah.

Karena itu, OPD teknis diminta segera

menyampaikan laporan terkait jadwal pelaksanaan pekerjaan infrastruktur agar pemerintah dapat memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.

Wakil Wali Kota menegaskan, percepatan pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan serapan anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Wa Ode Hamsinah Bolu juga mengingatkan para camat dan lurah yang baru dilantik agar meningkatkan perhatian terhadap kebersihan lingkungan, terutama pada musim hujan yang berpotensi menyebabkan genangan air.

Ia meminta aparat wilayah memastikan kondisi drainase dan selokan tetap bersih guna mengurangi risiko banjir serta menjaga kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

"Perhatikan kebersihan lingkungan, terutama drainase dan selokan, supaya tidak terjadi genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat," ujarnya.

Di akhir arahnya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada ASN maupun non ASN yang selama ini aktif mendukung penegakan disiplin kehadiran, baik dalam apel pagi maupun apel pulang kantor.

Menurutnya, disiplin aparat merupakan fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

"Terima kasih kepada ASN dan non ASN yang telah ber-sama-sama menegakkan disiplin kehadiran apel pagi maupun apel pulang. Kami sangat senang karena sudah proaktif mendukung kebijakan ini," tutupnya. (*)